



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Mei 2011

Halaman: 28





Tujuan akhir pemerintahan bukan penghargaan, tetapi dipercaya rakyat.

Yulianingsih

Berbagai anugerah yang telah diperoleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan nampaknya belum cukup. Perolehan Bung Hatta Award, penghargaan pemerintahan terbersih dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berbagai penghargaan serupa ternyata tidak membuat Pemkot setempat merasa puas.

Pemkot Yogyakarta justru terus berbenah diri untuk terus menjadi yang terbaik dalam menjalankan pemerintahan di masa mendatang. Bahkan tahun 2011 ini, Wali Kota Yogyakarta, Herry Zudianto membuat langkah baru untuk terus mewujudkan *good governance* di masa pemerintahannya. Pemkot Yogyakarta menganggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi DIY untuk memperlakukan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemkot tersebut.

Pemkot Yogyakarta telah membuat sebuah nota kesepahaman dan kerjasama antar kedua belah pihak untuk pelaksanaan program tersebut. "Kita ingin mempercepat instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah," tandas Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto.

Melalui naskah kerjasama bernomor 05/NKB.YK/2011 ini Pemkot dibantu BPKP Propinsi DIY sepakat menjalankan instruksi tersebut. Bahkan Pemkot Yogyakarta tercatat sebagai pemerintah daerah pertama di Indonesia yang telah menjalankan instruksi itu secara nyata dan terarah.

Berdasarkan instruksi presiden Nomor 4 tahun 2011 dinyatakan bahwa BPKP memang diberikan amanah untuk pelaksanaan program tersebut. Dengan begitu diharapkan pengelo-

lan keuangan daerah akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal itu akan berimbas pada kualitas pelayanan publik di daerah sendiri.

Kesepakatan antara Pemkot Yogyakarta dan BPKP Propinsi DIY tersebut ditandatangani Herry Zudianto dan Kepala BPKP Bambang Setiawan, akhir April 2011 lalu. Kesepakatan Bersama ini berisikan tentang pelaksanaan dan tindak lanjut rencana, serta upaya percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Program yang akan dilakukan BPKP di Pemkot Yogyakarta antara lain pengelolaan, keuangan daerah, penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Program-program

tersebut telah disusun dalam sebuah *action plan* yang terukur dan terarah dengan jelas. Di mana *action plan* tersebut juga diberikan dan ditindaklanjuti seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkot Yogyakarta.

Dalam sambutannya Herry Zudianto mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, juga selalu dikaitkan dengan tujuan reformasi dan proklamasi yakni menjadikan bangsa yang maju, sejahtera, berdaulat dan bermartabat. Untuk membangun hal ini, usaha promotif, dan preventif perlu diupayakan sehingga kesalahan-kesalahan sekecil apapun bisa dihindari.

"Ending dari semua ini adalah kita menjadi pemerintahan yang dipercaya masyarakat. Jadi

pemerintahan yang baik dan bersih itu bukan tujuan akhir. Tetapi tujuan akhir adalah pemerintahan yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Dan, apa yang sudah dibangun dan dicapai kota Yogyakarta selama ini menunjukkan bahwa kita sudah *on the track*," terangnya.

Menurutnya, Inpres Nomor 4 tahun 2011 telah memberi amanah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Karenanya kata dia, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah termasuk Pemkot Yogyakarta untuk tidak menjalankannya. Sebab keuangan daerah yang akuntabel akan berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik bagi masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut kata dia, akan seiring dengan visi dan misi Pemkot Yogyakarta sendiri.

Bambang Setiawan, Kepala BPKP Propinsi DIY mengatakan, Inpres Nomor 4 tahun 2011 dikeluarkan presiden dilatarbelakangi adanya keprihatinan presiden terhadap negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Menurut presiden, menilai akuntabilitas keuangan daerah selama ini belum terwujud secara optimal. Hal itu terlihat dari banyaknya pemerintah daerah di Indonesia yang masih berurusan dengan hukum, terkait keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan data, sedikitnya ada 150 pemerintah daerah dari 524 yang ada yang harus berurusan dengan hukum akibat tidak akuntabelnya keuangan daerah itu. "Ini menandakan bahwa akuntabilitas operasional jalannya pemerintahan belum optimal. Selain itu, aparat pemerintah yang diberi amanah untuk mengelola keuangan negara/daerah ternyata belum bisa berakuntabilitas secara optimal. Ini tercermin dari laporan keuangan 524 kepala daerah di Indonesia yang baru 15 Pemda diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya adalah Pemkot Yogyakarta," tambahya.

Karena itulah, Bambang mendukung dan memberikan apresiasi positif terhadap langkah Pemkot Yogyakarta untuk menjalankan instruksi presiden tersebut. Meskipun Pemkot setempat telah mengantongi banyak penghargaan di bidang terkait. "Indikator ini menandakan bahwa Pemkot Yogyakarta dengan kepemimpinan Wali Kota Herry Zudianto sudah cukup amanah. Ini adalah sebuah tantangan yang perlu dipertahankan dan lebih dikembangkan lagi," tegasnya.

Menurut Bambang, untuk menjalankan kerjasama tersebut pihaknya akan membantu dan melakukan pendampingan terhadap Inspektorat Pemkot Yogyakarta dalam menjalankan instruksi presiden itu.

■ edi: heri purwadita

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005